

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah menjadi salah satu solusi dalam percepatan pembangunan daerah, dengan otonomi daerah diharapkan alokasi keuangan antara pusat dan daerah menjadi seimbang tidak sebagaimana praktik pada masa orde baru. Urusan pemerintah sebagian dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang sebelum era reformasi masih dibawah kendali pemerintah pusat, maka setelah era reformasi sebagian urusan pemerintah dialihkan ke pemerintah daerah yang berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan dari pusat ke daerah. Otonomi daerah merupakan dampak dari ketidakseimbangan pertumbuhan daerah yang lambat berkembang dan dampak positif dari penerapan otonomi daerah yaitu perkembangan daerah yang kaya sumber daya alam akan jauh lebih pesat dibandingkan daerah yang sumber daya alamnya kurang.

Pemerintah daerah juga dituntut atau berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya melalui pengungkapan wajib pada laporan keuangan dan berdasarkan Kepmendagri No.29/2002 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mulai berlaku pada tahun anggaran 2003 dan

pada tahun anggaran 2005 kemudian diberlakukan PP RI No.24 Th. 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penelitian terkait pengungkapan wajib laporan keuangan belum banyak dilakukan karena keterbatasan informasi pemerintah yang dapat diakses oleh publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan wajib. Penelitian ini menggunakan pengungkapan wajib dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat *mandatory* sehingga lebih mengukur ketaatan dibandingkan dengan pengungkapan wajib. Namun pengukuran pengungkapan wajib yang bersifat *mandatory* ini juga dilakukan oleh Ingram dan Dejong (1987) serta Giroux (2003).

Ingram (1984) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara faktor ekonomi dan variasinya dalam praktik akuntansi di pemerintahan di Negara bagian Amerika Serikat. Ingram (1984) menggunakan empat faktor ekonomi dan politik yang digunakan sebagai variabel independen yaitu *coalition of voters, administrative selection process, alternative information source, dan management incentive*. Giroux (2003) struktur governance dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Laswad (2005) melakukan penelitian untuk melihat determinan yang memengaruhi pengungkapan wajib sukarela laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di New Zealand. Liestiani (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil sampel laporan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2006.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hilmi dan Martani (2012) dalam menguji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan di pemerintahan akan tetapi ada beberapa variabel yang berbeda, namun umumnya penelitian dilakukan pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan wajib pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dengan menguji kembali hasil hipotesis yang diterima dan menambah variabel baru yaitu pendapatan per kapita. Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama yaitu kekayaan daerah, kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian masyarakat kepada kinerja pemerintah daerahnya. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai bagaimana kekayaan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan daerah (Liestiani, 2008).

Faktor kedua yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yaitu jumlah penduduk, Liestiani (2008) menemukan bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan

terhadap tingkat pengungkapan wajib. Ingram (1984) serta Robbins dan Austin (1986) juga menemukan hubungan yang positif walaupun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah, semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan wajib yang harus mereka lakukan.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pendapatan per kapita. Styles dalam Hilmi dan Martani (2012) menggunakan pendapatan per kapita sebagai faktor yang memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas data keuangan di Amerika Serikat. Ia juga memperoleh bukti dengan semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah maka pemerintah juga cenderung memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengakses informasi keuangan daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2012). Ada banyak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, digunakan enam variabel independen, yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kualitas hasil audit.

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat jarang dilakukan, padahal informasi pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat atau pengguna laporan keuangan pemerintah. Sampai saat ini bukti empiris tentang pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti

mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dan diuji dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

A. Manfaat dalam bidang teoritis

- a. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengaruh kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Manfaat dalam bidang praktis

1. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat, dalam hal menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
2. Bagi pemerintahan, dapat mengetahui arti penting pertumbuhan daerah sebagai tindak lanjut dari faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik.